



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) PERUBAHAN

Nama SKPD	:	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan	:	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Sub-Kegiatan	:	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintah
Lokasi Kegiatan	:	Provinsi Sumatera Barat
Kode Rekening	:	4.01.03.1.01.01
Periode Pelaksanaan	:	2022



BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

2022



**KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN
SUB-KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2021, Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah, dengan fungsi :

1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah (kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa//kelurahan) perubahan nama dan pemindahan ibukota
2. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
3. Menyiapkan bahan pemberian dukungan, bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/ruipabumi
4. Menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan nagari/desa. Kelurahan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut telah difasilitasi dalam kegiatan tugas pemerintahan dan sub-kegiatan Pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan.

B. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan kegiatan guna terkelolanya administrasi kebijakan pemerintahan.

C. INDIKATOR KEGIATAN

Terlaksananya pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan.

D. PELAKSANAAN

1. Pada tanggal 22 Juni 2022 telah dilaksanakan rapat pembahasan pusat dan daerah dalam rangka reviu pelaksanaan otonomi daerah hasil pembentukan tahun 1999 s.d 2014 di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali, yang bertujuan

mendapatkan informasi terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing pemerintah daerah hasil pembentukan tahun 1999 s.d 2004.

2. Mengingat belum optimalnya pelaksanaan sub-kegiatan ini, untuk mendukung program prioritas Biro Pemerintahan dan Otda tahun 2022, maka sub-kegiatan ini dilakukan rasionalisasi dalam APBD-P 2022

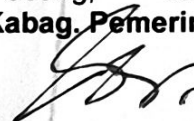
E. DUKUNGAN ANGGARAN

1. Pelaksanaan sub-kegiatan ini telah didukung dan terfasilitasi dalam APBD Provinsi Sumatera Barat DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 47.560.745.
2. Selama rentang waktu dari Januari s.d Juli 2022, telah direalisasikan sebesar Rp. 4.900.600 atau presentase 10,30 %.
3. Sisa anggaran sebesar Rp. 42.660.145,-, dirasionalisasikan menjadi Rp. 0,- pada APBD-P taun 2022.

F. KELUARAN

Pelaksanaan rasionalisasi ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun 2022.

Padang, Juli 2022
Kabag. Pemerintahan



NUZURWAN ERIXON, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 19720706 199203 1 002